
IDENTITAS MULTIKULTURAL SALAM –SARANI DI MALUKU UNTUK INTEGRASI BANGSA

Eklefina Pattinama

Fakultas Teologi Universitas Kristen Indonesia Maluku

Jl. Ot. Pattimaipauw, Talake, Ambon

Email: ecepattiukim@gmail.com

Abstract

There are many ethnic and sub-ethnic groups, religions and ideologies in Ambon and Saparua islands. These pluralistic existences imply that differences are core part of the society which can become a strength to live together, but also threat to the society. Ironically, there is a tendency to manipulate these pluralistic existences to become provocative issue to raise tension in these societies. Therefore, the aim of this article is to study how pluralistic societies such as people in Ambon and Saparua islands maintain national integrity through strengthening multi-cultural identity. By conducting field research and library study, the researcher find out that in order to develop multi-cultural identity, one must has an ability to maintain self-narration. In the self-narration people must have ability to develop consistency awarneses about continuity of self-biography. Besides, the very basic principle of people in Ambon and Saparua islands to maintain national integrity is through their daily activities as *anak negeri* which has shaped their religious special identity as *Salam-Sarani*.

Keywords: Identity, Multiculturalism, *Salam-Sarani*, national integrity.

Abastrak

Ada banyak etnik dan kelompok sub-etnik, termasuk beragam agama dan idiologi yang hidup bersama di Ambon dan Pulau Saparua. Reaalitas dan Pengalaman kemajemukan ini menegaskan bahwa perbedaan merupakan bagian utama dari suatu masyarakat yang dapat menjadi kekuatan untuk membangun kehidupan bersama, tetapi juga dapat mengancam. Ironisnya, ada kecenderungan untuk memanipulasikan kenyataan kemajemukan sebagai suatu masalah yang dapat memprovokasi dan menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk melakukan kajian bagaimana masyarakat yang majemuk di Maluku seperti di Ambon dan Pulau Saparua dapat memelihara integrasi kebangsaan melalui penguatan identitas multicultural. Dengan melakukan penelitian lapangan dan kepustakaan, peneliti dapat menemukan

bahwa untuk mengembangkan identitas masyarakat multicultural, setiap orang perlu memiliki kemampuan untuk memelihara narasi diri. Untuk memelihara narasi diri maka manusia harus mempunyai kemampuan mengembangkannya secara sadar dan konsisten, juga berlanjut. Di samping itu, prinsip dasar yang dihidupi oleh masyarakat Ambon dan Saparua dalam memelihara integritas bangsa adalah melalui aktivitas keseharian sebagai *anak negeri* yang membentuk identitas keagamaan secara khusus sebagai masyarakat *Salam-Sarani*.

Kata Kunci: Identitas, multikultur, Salam-Sarani, integrasi bangsa

PENDAHULUAN

Berbagai konflik di Indonesia dengan menggunakan atribut etnis dan agama mengancam integrasi bangsa. Disadari bahwa kebijakan nasional yang berbasis pemikiran pluralisme kebudayaan selama ini kurang berhasil dalam menjawab persoalan-persoalan integrasi Bangsa. Konflik-konflik yang terjadi, upaya-upaya mengangkat kembali budaya lokal yang dalam banyak kasus sudah tidak fungsional dalam kehidupan masyarakat setempat juga meningkat, sehingga batas-batas antar etnis menjadi semakin tegas dan menguat.¹

Multikultural muncul sebagai reaksi internal suatu bangsa terhadap proses anti integrasi dalam dirinya yang antara lain merupakan akibat pengaruh eksternal global yakni arus gerakan demokrasi dan hak asasi manusia global yang seringkali lintas bangsa dan tidak mempertimbangkan integritas internal suatu bangsa. Multikulturalisme bermula dari konsep masyarakat multikultural, yakni hadirnya beberapa kebudayaan bersama dalam suatu masyarakat. Konsep multikulturalisme itu mengandung tiga komponen, yakni: 1). Sesuatu yang berkenan dengan kebudayaan. 2) Adanya pluralitas kebudayaan. 3). Adanya sikap dan perilaku untuk menanggapi pluralitas tersebut.²

Sebagai gerakan kebudayaan, multikulturalisme secara intrinsik merupakan manifestasi dari kondisi-kondisi dunia multikultural global kontemporer yang tidak memuaskan. Multikulturalisme adalah akibat dari ketidaksetaraan dan ketidakadilan sosial, politik dan ekonomi dunia yang kapitalistik.³ Sekalipun multikulturalisme dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih sempit, yakni memelihara dan mempertahankan integrasi nasional suatu bangsa, konsep ini pada dasarnya lebih berakar pada pemahaman dan gerakan demokrasi dan hak asasi manusia global yang seringkali lintas-bangsa dan kurang memperhatikan kepentingan lokal atau bangsa.

Pada masyarakat multikultural, penggunaan identitas diri multikultural menjadi kekuatan mengatasi anti integrasi bangsa. Masyarakat multikultural di Maluku Tengah Ambon – Saparua memelihara integrasi bangsa selama konflik politisasi agama, etnis, pada tahun 1999. Hal ini terlihat pada interaksi sehari-hari

¹A. F. Saifuddin dan Zulyani Hidayah. Politik Dan Etnisitas: (Re) Konstruksi Kemelayuan di Riau: Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru. (Jakarta: LIPI Berkerja sama dengan Ford Foundation, 2000), 567-586.

²B. Parekh. *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*. (Cambridge: Harvard University Press, 2000).

³B. Parekh. “National Culture and Multiculturalism” dalam Kenneth Thompson (ed). *Media and Cultural Regulation*. (London: Sage Publications in association with the Open University, 1997).

masyarakat multikultural dengan menggunakan identitas diri mereka sebagai anak negeri Salam- Sarani. Kekuatan mempertahankan identitas diri ini, tidak hanya terbatas pada kuatnya hubungan kekerabatan pela dan gandong tetapi juga hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam kesatuan kebudayaan. Kuatnya perekat kesatuan budaya ini, membuat semakin terpeliharanya konsep identitas diri anak negeri Salam - Sarani dari generasi ke generasi berhadapan dengan berbagai perkembangan ke depan.

Identitas diri multikultural menurut Giddens⁴ ini terbangun oleh kemampuan untuk mempertahankan narasi diri. Di dalam narasi diri, yang dituntut adalah kemampuan untuk membangun perasaan yang konsisten soal kesinambungan biografi diri. “Diri” menjadi proyeksi refleksif, artinya diri menjadi sesuatu untuk direfleksi, dibentuk dan bahkan dicetak kembali. Di mana melalui aktivitas sehari-hari diri dengan diri yang lain yang hadir bersama secara fisik dalam konteks interaksi yang terikat oleh situasi. Ciri khas sosial kehadiran bersama berakar pada spatialitas tubuh yang terarah kepada yang lain dan kepada diri yang mengalami. Spatialitas tubuh merujuk pada spatialitas situasi, pada situasi tertentu tubuh aktif dalam ruang dan waktu, membantu individu melindungi tubuhnya, memberi rasa aman pada diri atau memberi keamanan pada diri dan juga pada keamanan kehidupan sosial, melalui tindakan interaksi sehari-hari antar individu.

Upaya untuk melihat gejala bekerjanya tindakan dan interaksi individu-individu memelihara integrasi bangsa dalam suatu proses, bukan menjadi isu kultur tetapi menjadi isu struktural. Isu struktural ini dapat dilihat dalam isu strukturasi Giddens. Kontribusi pemikiran Giddens dimanfaatkan untuk membaca data penelitian lapangan. Memahami pemikiran Giddens tentang teori strukturasi merupakan proses di mana struktur dibentuk melalui tindakan, dan tindakan dibentuk oleh struktur.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Realitas Multikultural di Maluku

Multikulturalisme adalah sebuah ide untuk melukiskan bahwa masyarakat terdiri dari keberagaman kultur yang berbeda, tetapi memiliki status sosial yang sama. Multikulturalisme muncul sebagai jawaban atas fakta keberagaman dalam suatu masyarakat.⁶ Karenanya diperlukan sikap keterbukaan (inklusif) dari setiap orang atau kelompok kultural yang berbeda untuk saling menerima, menghargai keberagaman, dapat merubah prasangka diskriminasi dan superioritas antar kelompok masyarakat. Hal senada juga disetujui oleh Lawrence Blum, seperti dikutip oleh St. Nugroho dkk.⁷ bahwa multikulturalisme meliputi sebuah paham, penghargaan, dan penilaian akan budaya seseorang serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain.

Multikulturalisme dibenarkan pertama kali di Amerika untuk menggambarkan realitas kemajemukan etnis, dan persoalan resisme terhadap etnis negro, yang berlangsung pada zaman pra kolonial hingga tahun 1960-

⁴Anthony Giddens. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. (London: Hutchinson of London, 1976).

⁵Malcolm Waters. *Modern Sociological Theory*. (London: Sage Publications, 1994), 47.

⁶Maulana Karengga. *Black and Latino Relation: Contents, Challenge, and Possibilities. Essay on Cultural Peace*. (London: Penguin Books, 1997), 196.

⁷St. Nugroho dalam Andre Ata Ujian, dkk. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama*. (Jakarta : t. p. 2006), 92.

an. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Anthoni Richard⁸ dimana ia berpendapat untuk memperlihatkan bahwa dalam suatu masyarakat atau bangsa yang bersifat multikultur memiliki potensi munculnya persoalan resistensi. Hal ini berpengaruh bagi sikap intoleransi, diskriminasi, dominasi, hegemoni, penindasan dan lain-lain dari kelompok dominan (ras kulit putih) terhadap suku dominan (ras negro dan kelompok pribumi), sehingga tidak ada kesempatan bagi mereka yang tersubordinat untuk mengekspresikan kultur mereka.⁹ Multikulturalisme muncul sebagai kritik terhadap adanya klaim monokultur yang dominan dan memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat, sehingga menimbulkan adanya praktik dominasi terhadap ras tertentu di Amerika.¹⁰

Pemaknaan terhadap konsep Multikulturalisme dapat dilakukan melalui pengakuan budaya (*cultural recognition*) dan perlakuan yang setara sifatnya terhadap eksistensi seluruh individu maupun kelompok dalam masyarakat. Kedua hal ini muncul sebagai alternatif atau secara umum untuk mengubah segala bentuk diskriminasi dan ketidakadilan dalam masyarakat terhadap kelompok etnis agama, ras tertentu dalam masyarakat atau negara. Pengakuan budaya dilakukan atas kesadaran bahwa setiap orang memiliki hak untuk diakui oleh publik, atas dasar kemanusiaan sebagai identitas setiap individu. Karenanya pengakuan budaya menjadi nilai yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan konsep multikultural, dimana setiap individu, kelompok diperlakukan dengan hormat dan setara. Taylor¹¹ menyatakan bahwa pentingnya sebuah pengakuan budaya, sebab fakta sosial selalu memperlihatkan bahwa identitas seseorang selalu dinegosiasikan melalui kontak kultural (dialog) dengan orang lain. Olehnya itu, pengakuan budaya sangat penting agar dapat menolak kerusakan hubungan antar kultur dan membuka ruang kepada setiap kultur agar menunjukkan eksistensinya. Sehingga setiap kultur tetap bertahan ditengah kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Dengan demikian, setiap individu dan kelompok dapat menerapkan identitas kultur, serta menemukan nilai dibalik setiap kultur masing-masing. Taylor memberikan tiga alternatif dalam menjalankan pengakuan budaya dan kesetaraan dalam suatu masyarakat atau negara melalui tiga jalur, yakni politik, pendidikan (peran negara), sosial.

Pertama, jalur politik memberikan ruang muncul sebagai wacana dan ideologi terkait persoalan multikultural sehingga memunculkan nilai normatif berupa hukum dan regulasi yang berfungsi untuk menegakkan prinsip-prinsip kesetaraan dan mengakui keberadaan setiap identitas, baik mayoritas dan minoritas tanpa adanya diskriminasi. Kedua, jalur pendidikan dimana setiap orang diajarkan untuk memahami, menghargai dan menghormati setiap individu, kelompok dengan latar belakang kultur yang berbeda atas persamaan hak yang berbeda, yakni sebagai manusia yang memiliki martabat dan hak asasi. Ketiga, jalur sosial dimana setiap individu dan kelompok memperlihatkan eksistensi untuk mengekspresikan identitas kulturalnya, tanpa ada gangguan dari pihak manapun, karena dilindungi oleh setiap undang-undang. Sebab undang-undang memberikan jaminan kepada semua kelompok kulturalnya, didalam struktur sosial masyarakat.

Bhiku Parekh¹² memetakan lima macam masyarakat multikultural. Pertama, Multikulturalisme Isolasionis, dimana setiap kelompok budaya menjalankan hidup secara sendiri-sendiri (otonom) dan kurang membangun interaksi sosial dengan kelompok masyarakat lain. Kedua, Multikulturalisme Akomodatif, dimana kelompok-kelompok budaya dominan membuat penyesuaian dan mengakomodir kebutuhan kultural kaum

⁸Anthoni Richard. *The Color Problem*. (Baltimore: Penguin Books, 1995), 23.

⁹Charles Taylor. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. (London:Princeton University Press, 1994), 5.

¹⁰David Golberg, *The Multiculturalism: a Critical Reader*. (Cambridge: Blackwell Publisher Inc., 1995), 5.

¹¹Charles Taylor. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*, 30.

¹²B. Parekh. "National Culture and Multiculturalism", 93-94.

misionaris. Ketiga, Multikulturalisme Otonomis, dimana tipe ini masyarakat ingin mewujudkan kesetaraan antar kelompok-kelompok budaya, baik budaya yang dominan maupun yang kurang dominan. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat mempertahankan hidup, memiliki hak yang sama dan memiliki mitra yang sejajar. Keempat, Multikulturalisme Kritis atau Interaktif, dimana masyarakat kurang terlalu peduli dengan kehidupan kultural otonom. Karena itu, mereka lebih menghendaki adanya pencipta kultur kolektif bagi semua orang. Kelima, Multikulturalisme Kosmopolitan, dimana pada tipe ini masyarakat ingin menghapus batas-batas wilayah agar pemilik-pemilik budaya tidak lagi terikat lagi dengan budayanya. Sebaliknya, mereka secara bebas terlibat dalam eksperimen interkultural dan mengembangkan kehidupan kulturalnya secara sendiri-sendiri.

Berdasarkan pendapat Charles Taylor dan Bhiku Parekh tersebut di atas, jelas bahwa keduanya sama-sama melihat perbedaan latar belakang hidup masyarakat sebagai suatu kenyataan yang perlu diterima, dihargai dan dihormati oleh seluruh komponen masyarakat sehingga mereka dapat saling mengakui di dalam masyarakat tanpa diskriminasi. Hal ini menandai bahwa tidak ada kelompok mayoritas dan minoritas. Semua kelompok masyarakat yang berbeda dapat mengekspresikan eksistensinya secara bebas, tanpa ditekan oleh siapapun. Realitas seperti ini dapat menciptakan integrasi bangsa dalam masyarakat multikultural.

Dalam realitas integrasi tercipta di Desa Wayame merupakan bukti kongkrit dari pengakuan budaya dan perlakuan serta dalam masyarakatnya yang multikultural. Masyarakat Wayame sebelum selama dan pasca konflik di Maluku tidak saling mendominasi untuk menonjolkan segala potensi (kekuatan) yang dimiliki untuk saling menguasai, menindas mengalahkan kelompok minoritas.

Kelompok masyarakat Salam adalah kelompok mayoritas 56% dan kelompok etnik terbesar adalah orang Buton. Namun, kekuatan terbesar itu tidak dijadikan sebagai alasan untuk menghancurkan tatanan kehidupan masyarakat yang telah dibangun bersama dengan susah payah. Mereka sadar bahwa membangun peradaban hidup masyarakat Wayame mengeluarkan begitu banyak energi, curahan perhatian dan pengorbanan yang tidak ternilai adanya. Karenanya mereka berhasil mewujudkan kesetaraan dan menjadi mitra yang sejajar, untuk mempertahankan masa depan yang gemilang.

Melalui cara hidup demikian, ditemukan adanya identitas yang menyatukan secara emosional orang basudara, salam-sarani di desa Wayame Ambon. Identitas multikultural menjadi kekuatan untuk memelihara integrasi bangsa di Maluku Ambon mapupundi Maluku Tengah Saparua. Bagaimana masyarakat multikultur memelihara integrasi bangsa di tengah ancaman anti integrasi. Saling menerima dengan memperkuat identitas multikultur salam- sarani menjadi model memelihara integrasi bangsa di Maluku.

2. Memperkuat Identitas Multikultural Salam – Sarani

Secara sosiologis-antropologis, terdapat kesatuan budaya yang dianut oleh masyarakat Maluku Tengah Saparua sejak dahulu, hidup dalam konsep Salam-Sarani. Negeri-negeri terbentuk dalam perbedaan kelompok, secara teritori maupun agama, yaitu ada negeri Salam dan negeri Sarani. Pemisahan sosial dalam bentuk kelompok negeri ini menimbulkan solidaritas primordial yang kuat di kalangan anggota kelompok. Di satu pihak terdapat solidaritas kelompok yang berbasis negeri, dan di lain pihak terdapat pula solidaritas kelompok berbasis agama.

Segregasi kelompok agama ini semakin diperkuat dengan wacana negara di tahun 1970-an dalam rangka tercipta stabilitas, diperkenalkan paradigma mayoritas – minoritas dalam manajemen pembangunan. Paradigma ini terwujud dalam berbagai produk undang-undang maupun praktik kenegaraan. Praktik kenegaraan dan berbangsa yang sangat kental dengan paradigma ini ialah Undang-undang No. 5 tahun 1975 tentang Pemerintahan Desa. Isinya menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan seluruh daerah diseragamkan dengan mengikuti pemerintahan umum. Otomatis sejak dikeluarkannya undang-undang ini, melumpuhkan fungsi pemerintahan adat. Wujud paradigma mayoritas-minoritas ini merupakan apresiasi dari nilai-nilai budaya Jawa yang dipaksakan pemberlakukannya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di awal tahun 1990-an basis paradigma mayoritas-minoritas mulai berubah, yaitu dari dominasi budaya Jawa menjadi dominasi keagamaan. Pendekatan mayoritas-minoritas berdasarkan nuansa keagamaan berubah esensi. Konsep Salam-Sarani yang bernuansa kultural menjadi konsep Islam- Kristen yang universal. Implikasinya terjadi politisasi agama semakin kuat dan mempertajam segregasi sosial yang sudah ada di masyarakat. Mengantisipasi berkembangnya nuansa eksklusifisme agama dalam masyarakat, maka pemerintah negeri Sirisori Salam dan pemerintah negeri Sirisori Sarani menyikapinya dengan mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Maluku untuk menghilangkan konsep Salam- Sarani pada nama negeri Sirisori Salam dan negeri Sirisori Sarani. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur, Kepala Daerah Tingkat I Maluku N0. 146/SK/39/89 tentang penetapan jumlah serta nama desa dan kelurahan di Provinsi Maluku tahun 1988/1989, terjadi perubahan nama desa/negeri: Sirisori Islam menjadi Sirisori, Sirisori Sarani menjadi Sirisori Amalatu. Alasan utama menghilangkan konsep identitas Salam-Sarani pada nama negeri masing-masing ini terjadi agar masyarakat tidak di kotak-kotakan berdasarkan agama.

Walaupun demikian dalam realitas aktivitas kehidupan keseharian warga masyarakat negeri Sirisori Salam dan negeri Sirisori Sarani, tetap menggunakan identitas diri mereka sebagai anak negeri Sirisori Salam atau anak negeri Sirisori Sarani. Sekalipun telah terjadi konflik politisasi agama etnis, tidak merubah cara pandang masyarakat Saparua terhadap konsep identitas dirinya sebagai anak negeri Salam dan anak negeri Sarani. Bukan melalui konsep identitas anak negeri Salam-Sarani masyarakat Saparua memposisikan dirinya memiliki karakter, dialek bicara dan pola hubungan sosial yang khas, berbeda dengan masyarakat lain di luar Saparua. Adapun kekuatan mempertahankan identitas diri ini, tidak hanya kuatnya hubungan kekerabatan pela dan gadong tetapi juga hubungan sosial, ekonomi dan politik dalam kesatuan kebudayaan. Kuatnya perekat kesatuan budaya ini, membuat semakin terpeliharanya konsep identitas diri anak negeri Salam- Sarani di Saparua dari generasi ke generasi berhadapan dengan berbagai perkembangan ke depan.

Giddens¹³ memandang identitas diri ini terbangun oleh kemampuan untuk mempertahankan narasi diri. Di dalam narasi diri, yang dituntut adalah kemampuan untuk membangun perasaan yang konsisten soal kesinambungan biografi diri. Identitas diri bukanlah sifat distingtif atau bahkan kumpulan sifat-sifat, yang dimiliki individu. Identitas adalah diri sebagaimana yang dipahami secara reflektif oleh orang dalam konteks biografisnya. Stuart Hall¹⁴ mengatakan, konstruksi identitas dapat dilihat sebagai penciptaan perbedaan yang dibentuk secara historis; pemikiran seperti ini menekankan konstruksi identitas sebagai sebuah proses sosial

¹³ Anthony Giddens. *Modernity and Self Identity*. (San Francisco: Standford University Press, 1991).

¹⁴Chris Barker. *Cultural Studies: Teori Dan Praktik*. (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004), 172.

“menjadi” sekaligus juga terjadi, juga sebagai upaya memposisikan ketimbang sebuah esensi. Membangun sebuah identitas adalah juga sebuah permainan sejarah, budaya dan kekuasaan secara terus menerus dalam berbagai situasi.¹⁵

Pada identitas diri seperti inilah yang mendorong anak negeri Salam-Sarani di Saparua, melalui interaksi para pelaku sehari-hari, konsep identitas diri sebagai anak negeri Salam – Sarani tetap diproduksi kembali. Hal ini menunjukkan identitas tidak dapat eksis di luar representasi budaya. Identitas bukan merupakan esensi tetap yang dimiliki, tetapi identitas “menjadi”. Pada pemahaman identitas seperti ini, menunjukkan bahwa identitas tidak mungkin bisa dipisahkan dari tindakan si pelaku.

Stuar Hall sebagaimana dikutip oleh Li¹⁶ menilai bahwa konstruksi identitas merupakan proses sosial di mana dua sisi muncul secara simultan yaitu penggabungan dan perbedaan. Bentuk-bentuk dari penggabungan dan perbedaan ini disebut dengan istilah artikulasi membutuhkan proses pembuatan batas-batas sekaligus pula menghubungkan yang tidak bersifat permanen, melainkan tergantung pada konteks di mana kepentingan penggabungan maupun pemisahan tersebut memiliki relevansi bagi agen. Tania Li dalam penelitiannya tentang bagaimana identitas etnik orang-orang Laudje dan Lindu di Sulawesi Tengah, mengakui bahwa kerangka teoritis dari Hall ini sangat membantunya dalam memecahkan problem empirik dan politik dari sebuah proses pembentukan identitas sosial.¹⁷ Dalam pandangan Li, konsep artikulasi dan pemosisian diri memberikan dimensi kontekstual dan relasi kekuasaan pada proses pembentukan sebuah identitas (etnik) yang ia teliti. Melalui kasus artikulasi identitas etnik di Sulawesi, Li memberi catatan bahwa konstataksi kekuasaan terjadi dalam proses artikulasi identitas tersebut dalam konteks memperoleh akses atas sumber daya alam.

Pada masyarakat di Ambon-Saparua tergolong masyarakat yang heterogen, tidak hanya terdiri dari kelompok beridentitas agama anak negeri Salam-Sarani saja, tetapi juga ada orang dagang/para pendatang. Kekayaan sumber daya alam Saparua, khusus cengkih dan pala, sejak dahulu telah menarik para pedagang dari luar Maluku. Orang Tionghoa, Arab, Buton, Makasar, Jawa di Saparua telah membaur dengan anak negeri Salam-Sarani. Walaupun orang dagang telah berbaur dengan anak negeri, umumnya tradisi nenek-moyangnya tetap dipertahankan. Ini nampak pada upaya orang dagang mengartikulasikan dan memposisikan diri mereka, di satu sisi tetap memiliki identitas etnis asalnya sebagai orang Cina, Arab, Buton, Makasar, Jawa.

Pada sisi yang lain, untuk mempertahankan diri berada di tengah masyarakat berbeda etnis dengannya, orang dagang menggunakan juga identitas diri sebagai anak negeri Saparua. Dalam aktivitas keseharian orang dagang menyebut dirinya sebagai “orang Buton Saparua”, “orang Cina Saparua”, “orang Arab Saparua”, dan lainnya. Identitas ini merupakan identitas yang dikonstruksikan oleh orang dagang berperan dalam membangun relasi kekuasaan dengan anak negeri untuk mendapatkan akses atas sumber daya alam di Saparua, sekaligus sebagai pelestarian hidup mereka di Saparua. Identitas multikultural ini menjadi bagian dari upaya memposisikan diri si pelaku, menunjukkan konstruksi jati dirinya dalam interaksi dengan orang lain di luar

¹⁵Tania Li. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. Berkeley Workshop on Environmental Politics. (Berkeley: University of California, 2000).

¹⁶Tania Li. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. Berkeley Workshop on Environmental Politics, 24.

¹⁷Tania Li. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia: Resource Politics and the Tribal Slot*. Berkeley Workshop on Environmental Politics, 4.

lokal budayanya. Giddens¹⁸ menyebut identitas sebagai proyek diri, bahwa identitas merupakan sesuatu yang diciptakan oleh manusia, yang memiliki kemampuan diri, sesuatu yang selalu dalam proses, suatu gerak maju dari membangun apa yang dipikirkan, diharapkan dari identitas diri. Apa yang dipikirkan agen pelaku akan berubah-ubah dari lingkungan yang satu ke lingkungan lain, dalam pertentangan ruang dan waktu. Di dalam ruang dan waktu subjek mampu berpikir dan mengenal identitas dirinya sebagai sebuah proyek diri (*self identity as a project*) dan agen berusaha untuk menyusun lintas biografi dirinya dari masa lalu, kemasa depan lintas harapan ke depan.

Identitas bersifat individu, juga sosial, identitas diri diciptakan melalui proses sosial.¹⁹ Proses itu terjadi dalam diskursus bahasa. Bahasa memungkinkan individu melakukan interaksi dengan individu yang lain. Dalam interaksi suatu biografi diri menjadi mungkin untuk terbentuk. Dengan demikian, biografi diri tidak muncul secara individu, tetapi terbentuk melalui interaksi dengan yang lain. Bahasa merupakan simbol kultural, dari bahasa didapati modus pemaknaan dan penanaman terhadap perjumpaan sehari-hari si pelaku, dari yang paling kecil hingga ke dimensi sosialitas yang lebih besar lagi. Betapapun bahasa berperan positif bagi pembentukan makna, bentuk-bentuk kekuasaan justru mendasari di balik beroperasinya bahasa. Bahasa menempati posisi strategi bagi penyemaian ideologi yang ada dibalikinya, serta mengandaikan modus kekuasaan tertentu dalam setiap praktik bahasa, pilihan kata, gaya mengungkapkan, hingga kandungan pengetahuan yang diungkapkan atau disamarkan oleh suatu bahasa. Karena itu bahasa menjadi penting bagi individu dan masyarakat dalam kelompok tertentu untuk meraih, melanggengkan, bahkan mempertahankan identitas diri dan ruang hidup para agen pelaku.

Penggunaan identitas multikultur orang dagang di Saparua, menunjukkan: 1). Secara biografi identitas etnis nenek-moyangnya, tetap melekat dengannya, tetapi dirinya sadar bahwa kini, “diri”nya ada dalam ruang yang menghidupinya, mengharuskannya untuk menyatu dengan diri dengan identitas lokal. 2). Identitas multikultur menunjukkan bahwa orang dagang bukan lagi orang “luar”, tetapi telah “menjadi” orang “dalam”, berusaha menerima budaya lain menjadi budayanya. Sebaliknya, anak negeri di Saparua tidak menolak, bahkan menerima pengakuan orang dagang sebagai yang menjadi. Saling menerima inilah yang mendorong orang dagang yang telah mengungsi selama konflik di luar Saparua, memilih dan mengambil keputusan, untuk kembali ke Saparua. Selain meneruskan usaha dagangannya tetapi merasa diterima kembali oleh anak negeri Saparua sebagai bagian dari komunitasnya. 3). Dengan identitas multikultur yang digunakan orang dagang di Saparua, sebagai bagian dari upaya memposisikan diri dalam konteksnya, yang berbeda dengan orang dagang di tempat yang lain. Orang Cina Saparua, berbeda dengan orang Cina yang ada di Ambon, dan lainnya. Kekhasan identitas multikultur ini ditunjukan pada kemampuan orang dagang di Saparua membuktikan bahwa dirinya menyatu dengan anak negeri Saparua. Hal ini ditunjukkan melalui interaksi orang dagang dengan anak negeri, dengan menggunakan gaya bicara (dialek lokal), bahkan sekali-kali dalam percakapan menggunakan bahasa daerah setempat.

Bahasa dan gaya sebagai simbol yang digunakan dalam praktik sosial berlangsung secara terus menerus dan berulang sebagai upaya membangun kebersamaan, saling percaya dan saling bergantung. Identitas dimaknai melalui kepercayaan dan sikap, identitas ini bersifat personal sekaligus sosial yang menandai bahwa

¹⁸Anthony Giddens. *Modernity and Self Identity*. (San Francisco: Standford University Press, 1991).

¹⁹Chris Barker. *Cultural Studies: Teori Dan Praktik*, 248.

agen pelaku berbeda dengan orang lain. Giddens sebagaimana dikutip oleh Sutrisno²⁰ memandang identitas bersifat sosial, berhubungan dengan hak, kewajiban dan sanksi normatif yang ada dalam masyarakat. Dengan kata lain identitas bersifat dualitas struktur, personal dan sosial, lokal dan nasional, hasil konstruksi agen pelaku. Identitas sepenuhnya bersifat kultural, identitas tidak bisa exis di luar representasi budaya. Identitas juga bukan merupakan esensi (realitas) tetap yang dimiliki setiap orang, tetapi merupakan suatu entitas yang bergerak “menjadi”. Identitas yang menjadi ini perlu diperkuat dalam memelihara integrasi bangsa.

3. Memperkuat identitas multikultural dan memelihara Integrasi Bangsa Di Maluku

a. Membudayakan Nilai Agama “Saling Menghormati”

Agama selain telah menjadi alat provokasi dalam konflik politisasi agama, tetapi ada sejumlah nilai-nilai keagamaan dapat menjadi budaya lokal dalam menciptakan integrasi bangsa, Masyarakat menyatakan bahwa agama memberi penguatan spiritual dalam kehidupan manusia. Tokoh-tokoh agama, berperan sebagai fasilitator mensosialisasikan nilai-nilai keagamaan sebagai nilai-nilai inti, memantapkan masyarakat beragama untuk tunduk pada nilai-nilai itu. Didukung dengan aktivitas ritual agama sehari-hari, menyampaikan pokok-pokok doa dan dialog bersama, menjadi kekuatan membangun kebersamaan lintas agama di Saparua. Sekalipun realitas sosial di Ambon, bahwa telah terjadi segregasi pemukiman berdasarkan perbedaan agama. Namun segregasi itu pula selama ini menimbulkan toleransi beragama khas Maluku, persoalannya mengapa agama menjadi kekuatan integrasi bangsa.

Geertz²¹ memandang agama sebagai sistem simbol yang bertindak memantapkan perasaan (*moods*) dan memiliki motivasi yang kuat, menyeluruh dan bertahan lama pada diri manusia, dengan cara memformulasikan konsepsi-konsepsi mengenai hukum/keteraturan (*order*) yang berlaku umum dan menyelimuti konsep-konsep ini dengan suatu warna tersendiri mengenai hakikatnya yang nyata sehingga perasaan-perasaan dan motivasi-motivasi yang ada nampaknya secara tersendiri adalah mengenai “yang nyata”. Dengan menggunakan batasan ini berarti, Agama digunakan oleh warga masyarakat sebagai pandangan hidup yang berfungsi menjelaskan keberadaan manusia di dunia, dari mana ia berasal, dan ke mana ia akan pergi sesudah meninggal, dan agamalah satu-satunya bagian kebudayaan yang mampu menjelaskan arah dan tujuan hidup manusia. Itulah sebabnya agama dikatakan sebagai inti kebudayaan. Oleh karena agama tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia lainnya, maka berarti agama juga terkait erat dengan aspek-aspek lain dalam kehidupan masyarakat seperti kekerabatan, kepemimpinan, politik, ekonomi, dan sebagainya.

Agama sebagai sistem simbolis menggunakan simbol-simbol untuk untuk berkomunikasi dan untuk menghadapi lingkungannya. Bahwa simbol-simbol keagamaan itu penuh dengan muatan emosi dan perasaan, maka ajaran-ajaran agama yang diketahui dan dianut oleh seorang warga masyarakat adalah suatu pedoman hidup yang diyakini sepenuhnya akan kebenarannya.

²⁰Muji Sutrisno, dkk., *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*. (Jakarta: Penerbit Koekoesan, 2007), 118-119.

²¹Clifford Geertz. *Ritual and Social Change : A Javanese Example*, dalam *The Interpretation of Culture*. (New York: Basic Books, 1973).

Dalam agama terdapat sesuatu yang suci yakni, simbol-simbol suci dan aturan yang bersifat normatif yang memandu kehidupan sehari-hari manusia beragama. Durkheim sebagaimana dikutip oleh Ritzer²² memandang agama itu sendiri sebagai sistem keyakinan yang utuh serta praktik-praktik kehidupan yang mampu mempersatukan ke dalam kesatuan moralitas masyarakat. Agama merupakan lambang kolektifitas masyarakat dalam bentuknya yang ideal. Karena itu agama merupakan sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif yang diwujudkan melalui upacara-upacara atau ritus-ritus, dan kesadaran kolektif adalah sumber solidaritas yang mendorong setiap orang yang beragama sama untuk bekerja bersama. Keyakinan dari kesadaran kolektif tercermin dalam aturan-aturan sebagai norma-norma, yang harus ditaati memperkuat kesadaran kolektif.

Agama dipandang baik oleh Geertz dan Durkheim sebagai sistem nilai yang memiliki bersama nilai-nilai, norma-norma, keyakinan-keyakinan yang ada pada masyarakat dan manusia dikendalikan oleh sistem sosial dalam menciptakan konsensus atau integrasi. Sebab keyakinan agama dalam sistem sosial adalah konsensus.

Berbeda dengan pandangan itu, Weber sebagaimana dikutip oleh Ritzer dan Goodman²³ berfokus pada pengaruh keyakinan agama terhadap tindakan. Bagi Weber, dunia sebagaimana kita saksikan terwujud karena tindakan sosial. Manusia melakukan sesuatu karena ia memutuskan untuk melakukan itu untuk mencapai apa yang dikehendaknya. Setelah manusia memilih sasaran, diperhitungkan keadaan, kemudian memutuskan tindakan. Struktur sosial adalah produksi dari tindakan itu, cara hidup adalah produk dari pilihan yang dimotivasi. Berbeda dengan pemikiran Durkheim dan Geertz yang memandang tindakan manusia di kendalikan oleh struktur-fungsional, manusia dikendalikan oleh nilai-nilai, norma-norma dalam sistem sosial sesuai keyakinannya.

Weber melakukan rekonstruksi makna di balik kejadian sejarah yang menghasilkan struktur dan bentuk sosial. Dalam kehidupan beragama, bagi Weber, peranan pemimpin agama dalam mempromosikan berbagai macam ide dan orientasi pada masyarakat sangat penting. Namun individu yang memilih untuk bertindak sesuai keyakinan agamanya. Keyakinan agama mempengaruhi tindakan manusia. Nasib tidak digariskan oleh Tuhan, melainkan manusialah yang harus mengubah nasibnya sendiri. Sejalan dengan pemikiran ini, Weber memandang konsensus atau integrasi diproduksi oleh tindakan manusia, bukan sistem keyakinan umat beragama. Weber mengakui peran pemimpin agama mensosialisasikan aturan-aturan, norma-norma agama sangat penting, mendorong individu beragama bertindak berdasarkan keyakinannya yang benar.

Dalam kehidupan manusia, agama berfungsi sebagai suatu sistem nilai dan norma yang memiliki daya ubah (*trasformabilitas*) bagi komunitas pelakunya. Secara umum, norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan berperilaku agar sejalan dengan tuntutan agamanya. Agama dalam hal ini diartikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang ditunjukkan oleh individu, kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasikan dan memberi respons terhadap apa yang dirasakan dan diyakni sebagai suatu kebenaran. Di samping itu, agama juga merupakan refleksi iman seseorang yang tidak terbatas pada kepercayaan, tetapi juga berimplikasi merefleksikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari atau yang disebut sebagai perilaku beragama. Perilaku keberagamaan, akan melahirkan berbagai kreasi budaya dengan nilai kepercayaan yang dikandungnya. Manusia dan agama merupakan dua sisi yang saling berpengaruh. Sebagai

²²G. Ritzer. *Modern Sociological Theory*. (New York: The McGraw-Hill Companies Inc., 1996).

²³G. Ritzer Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta: Prenada Media, 2004), 158

unsur yang dibutuhkan manusia agama memberikan layanan psikologi kepada manusia untuk menyajikan sesuatu yang dibutuhkannya. Sementara itu manusia disisi lain, memberikan pengaruh secara signifikan dalam proses perubahan nilai yang banyak dipengaruhi oleh agama dalam membentuk tatanan dalam masyarakat.²⁴

Posisi agama sebagai institusi yang mendorong tindakan manusia, peranan manusia dan interaksi dan relasi yang terarah. Bachtiar Efendi²⁵ melihat peran dan fungsi agama dalam masyarakat sebagai berikut. Pertama, fungsi edukatif, yang terkait dengan upaya pemindahan dan pengalihan (transfer) nilai, norma keagamaan kepada masyarakat. Agama sanggup memberi orientasi dan motivasi serta membantu untuk mengenal dan memahami sesuatu yang dianggap “sakral”. Kedua, agama berfungsi sebagai penyelamat. Ketika agama memberikan rasa kedamaian, ketika agama memberikan rasa ketenangan dan ketika agama memberikan rasa ketabahan dalam menghadapi berbagai persoalan yang sulit dihadapi manusia, maka ketika itu agama berfungsi membimbing dan mengarahkan manusia untuk memperoleh kebaikan. Ketiga fungsi agama sebagai kontrol sosial. Agama memberikan pembatasan dan pengkondisian terhadap tindakan atau perilaku individu dan masyarakat. Bentuk kontrol sosial agama terhadap masyarakat adalah fungsi propetik atau fungsi kritis agama. Agama berusaha memberikan kritis evaluasi terhadap masalah-masalah sosial dan agama berupaya menjaga terciptanya dan tegaknya keadilan sosial. Keempat, agama berfungsi sebagai sistem relasi sosial yang berfungsi integratif. Agama menjadi sumber utama terbentuknya integrasi dalam masyarakat Agama bahkan dipandang memiliki kemampuan membangun tatanan sosial yang mapan dan kuat. Kelima, agama berfungsi sebagai transformatif dalam perubahan sosial. Agama berfungsi mengubah bentuk, bagaimana agama memiliki daya ubah tatanan kehidupam dalam masyarakat.

Fungsi agama di atas memperlihatkan bahwa agama terbentuk sebagai institusi yang menyusun pola-pola tindakan, peranan dan relasi yang terarah. Tindakan atau perilaku keagamaan sebagai realitas berwujud; sistem kepercayaan, pengungkapan praktik sebagai sistem persembahan, serta pengungkapan sosiologi sebagai sistem hubungan masyarakat (*system of social relation*), yang memiliki fungsi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Semua ajaran agama mengandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan kedamaian yang membentuk jiwa manusia beragama. Terwujud dari nilai-nilai agama ini tindakan manusia untuk saling menghormati, menjunjung kemanusiaan sejati sebagai bagian dari keyakinan pada Yang Maha Kuasa. Tindakan saling menghormati harus tercermin dalam bertindak adil, menciptakan damai dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai keagamaan dari saling menghormati mendorong manusia beragama untuk hidup dalam kedamaian dengan orang lain, menghormati hak asasi orang lain, dan berperilaku adil, bermoral dalam kehidupan bersama lintas agama, wujud dari integrasi baru.

b. Memperkuat nilai saling percaya (*trust*)

Dalam kerjasama saling percaya (*trust*) menjadi dasar harus dibuktikan dalam perilaku yang jujur, dapat dipercayai orang lain. Di sinilah *Trust* yang terjadi dalam hubungan antar individu tidak terjadi dengan

²⁴Ronald Robertson. *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. (terj.) Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993).

²⁵Bachtiar Effendi. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan mengenai Islam, Masyarakat Madani, dan Etos Kewirausahaan*. (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

sendirinya, melainkan harus diusahakan. Untuk maksud itulah, Giddens²⁶ mengembangkan apa yang disebutnya *active trust*. *Active trust* selanjutnya oleh Giddens dijadikan sebagai upaya menjaga berlangsungnya hubungan murni (*pure relation*) dalam masyarakat. Yang dimaksudkan dengan hubungan murni adalah hubungan yang didasarkan atas komunikasi emosional, dimana imbalan yang diperoleh adalah kelangsungan hubungan tersebut. Tindakan integrasi dalam ekonomi lokal antar etnis ini di dasari pada nilai saling percaya (*trust*), tercipta ikatan kerjasama antar anak negeri dan orang dagang, yang saling bergantung satu sama yang lain yang memperkuat kerjasama lintas etnis melalui interaksi sehari-hari para pelaku, memperkuat kerjasama ekonomi lokal, dalam mewujudkan integrasi baru pascakonflik.

Konsep *trust* yang dikembangkan Giddens mendapat pengaruh dari Erik Homburger Erikson, seorang psikoanalisis kelahiran Jerman yang sangat terkenal dengan delapan tahapan perkembangan psikologi manusia. *Trust* mulai terlihat sejak bayi, *trust* harus ditata dengan baik oleh ibu atau pengasuhnya, karena *trust* akan berubah menjadi ketidakpercayaan (*distrust*) apabila tidak dikembangkan dengan baik. Sebaliknya bila *trust* dikelola dengan baik, maka ketika seseorang mencapai tahap dewasa, dia mampu menemukan identitasnya. Dengan identitas itulah seseorang masuk dalam kehidupan sosial yang lebih dekat oleh Erikson disebut sebagai kemampuan untuk melibatkan dirinya ke dalam ikatan-ikatan konkret dan persekutuan, dan mengembangkan kekuatan etis untuk mematuhi kesepakatan bersama.

Di sini *trust* bukan merupakan sesuatu yang *given*, melainkan yang selalu diusahakan. Apabila seseorang memiliki *basic trust*, maka ia memiliki modal dasar untuk memasuki kehidupan sosial yang baik. Dia mampu melakukan hubungan akrab dengan orang lain, tanpa menghilangkan identitasnya dan sekaligus mampu menghargai orang lain.²⁷ Konsep *trust* ini diusung Giddens ke dalam hubungan antara individu dalam masyarakat. *Trust* dalam interaksi antar individu harus diusahakan, karena itu Giddens mengembangkan dengan apa yang disebutnya *active trust*, sebagai upaya menjaga berlangsungnya hubungan murni (*pure relation*) dalam masyarakat.

c. Tindakan Reflektif: Strategi memperkuat identitas multikultural memelihara integrasi bangsa.

Menghadapi konflik politisasi agama dan etnis, individu-masyarakat, agen-struktur di Saparua, tidak hanya menggunakan kekuatan sistem sosial mengendalikan pikiran dan tindakan individu memelihara keteraturan yang ada. Tetapi dengan kemampuan transformatif para pelaku menggunakan strategi monitoring, memilih, memutuskan tindakannya menciptakan keamanan bagi dirinya dan orang lain.

Keteraturan diciptakan manusia. Hannah Arendt²⁸ memandang manusia dalam tiga dimensi *via active*-nya, yaitu kerja (*labor*), karya (*work*) dan tindakan (*action*). Dari ketiganya, yang mengekspresikan dan mengkonstitusikan dimensi politik manusia adalah tindakan. Politik menurut Arendt bukanlah bawaan (dan karena itu niscaya), melainkan buatan (dan karena itu kontingen). Politik adalah suatu tindakan strategi. Tetapi

²⁶Anthony Giddens. *Beyond Left and Right: The future of Radical Politics*. (San Francisco: Stanford University Press, 1994), 57, 60, 118.

²⁷Erik H. Erikson. *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*. (terj.). Agus Cremers, (Jakarta: Gramedia, 1989), 279.

²⁸Hannah Arendt. "What Is Freedom?" dalam Peter Baehr (ed.), *The Portable Arendt Hannah Arendt*. (New York, Penguin Books, 2000), 22-23.

tindakan itu sendiri tidak mungkin tanpa masyarakat. Kalau aktivitas lain (kerja dan karya) dapat dimengerti di luar masyarakat, maka tindakan tidak demikian. Bahkan tindakan adalah prerogatif eksklusif manusia. Melalui tindakan manusia dibedakan dari spesies binatang. Manusia dipandang sebagai makhluk yang bertindak dan bertutur, ekspresi dan komunikatif. Manusia bertindak berarti manusia, memulai melakukan pilihan-pilihan dan menciptakan.

Antropologi politis memandang manusia adalah makhluk politik sebagai hasil konstruksi tindakan bebas dan sadarnya, bukan sebagai bawaan alamiah. Manusia dapat melakukan berbagai strategi sebagai upaya manusia mempertahankan hidupnya dan hidup orang lain. Manusia tidak hanya dikendalikan oleh sistem dan struktur tetapi juga akan mengubah struktur melalui pikiran dan tindakannya.

Menyadari bahwa sekalipun telah terkonstruksi integrasi baru pascakonflik, sebagaimana diuraikan di atas, namun potensi konflik akan tetap hidup seperti api dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat meledak bila ada kesempatan.²⁹ Ada berbagai potensi terpendam yang memungkinkan munculnya konflik baru bila ada kesempatan. Inilah risiko masyarakat modern. Giddens³⁰ melihat risiko itu tidak datang dari alam untuk manusia tetapi risiko itu merupakan akibat dari perbuatan manusia sendiri, risiko itu sebagai *manufactured risk*. Persoalannya bagaimana agen – struktur, membentuk dan membentuk kembali diri agar mampu menghadapi perubahan di lingkungannya. Karena kondisi-kondisi baru tetap akan muncul di sekitar agen pelaku dan membuat agen-struktur harus mampu mengelola dan memberikan makna kepada dunia yang tidak stabil, dengan cara-cara baru yang muncul dari kesadaran dan tindakan agen.

Bagi Giddens³¹ satu-satunya arah tindakan manusia dalam situasi ini adalah membentuk diri sendiri. Artinya dengan tindakannya manusia secara rutin beradaptasi dengan kesadaran dirinya, tentang apa yang sedang terjadi, membentuk diri, suatu identitas agar sesuai dengan kondisi dan tidak harus begitu besok. Inilah proses yang disebut Giddens sebagai refleksivitas. Refleksivitas adalah nama yang diberikan Giddens untuk menemukan sekuriti ontologisme di dalam keadaan ketidakamanan, muncullah refleksi diri, yang bertolak dari kesadaran diri datang dari dalam. Melalui refleksi diri manusia mencari cara-cara lain untuk menjadikan dirinya dan mewakili diri orang lain. Jika diri menemukan sesuatu adalah cara yang didapat untuk menunjukan diri, sebagai unsur material dari kebudayaan konsumen yang menjadi ekspresi identitas diri

Dalam hal ini tubuh menjadi wadah penampilan fisik manusia, memberikan kontribusi bagi pemahaman mengenai diri yang semakin refleksif, menunjukan suatu kesadaran bahwa identitas dipilih dan dikonstruksi. Sebagaimana dikatakan Giddens³² diri dalam “modernitas akhir” telah menjadi proyek refleksif: diri itu diciptakan (atau diciptakan kembali) melalui pluralitas pilihan dan keputusan gaya hidup. Tubuh menjadi sosok nyata pembawa identitas diri dan tubuh semakin terintegrasi ke dalam keputusan-keputusan gaya hidup yang diambil individu.³³ Refleksivitas diri dinampak melalui tindakan strategi bertahan menghadapi realitas kemungkinan konflik baru.

²⁹ Parsudi Suparlan. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. (Jakarta: Yayasan Kajian Ilmu Kepolisian, 2003), 23.

³⁰ Anthony Giddens. *Politics, Sociology, and Social Theory: Encounters with Classical and Contemporary Social Thought*. (Cambridge: Polity, 1995).

³¹ Anthony Giddens. *Runway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. (London: Routledge, 1999).

³² Anthony Giddens. *Modernity and Self Identity*. (San Francisco: Stanford University Press, 1991).

³³ A. F. Saifuddin dan Zulyani Hidayah. *Politik Dan Etnisitas: (Re) Konstruksi Kelayuan di Riau: Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*, 254.

Strategi berasal dari bahasa Yunani “*strat- egia*” yang berarti kepemimpinan atas pasukan, atau seni memimpin pasukan. Hingga awal zaman industrialisasi, pengertian strategi hampir hanya terbatas pada bidang militer. Baru sesudah itu, kepemimpinan atas sejumlah besar orang diperlakukan pula di bidang ekonomi. Sejak itu, pengertian strategi memperoleh perkembangan makna. Terciptalah strategi perusahaan yang diperlukan dalam kepemimpinan terencana atas orang-orang dalam suatu perusahaan. Sedikit demi sedikit pengertian strategi makin diperluas ke berbagai aspek masyarakat. Tentu saja pengertian ini juga diperluas di bidang politik, karena menggerakkan massa dalam jumlah besar atau anggota politik dan organisasi untuk mencapai tujuan, juga berlaku dalam bidang antropologi.

Strategi dipandang sebagai cara-cara, kiat-kiat yang dikembangkan pelaku dalam interaksi dan negosiasi berbagai kepentingan-kepentingan pelaku. De Certeau (1984:36-37)³⁴ membedakan antara strategi kekuasaan dengan taktik perlawanan. Strategi adalah saran yang digunakan kekuasaan yang menciptakan suatu ruang bagi dirinya sendiri yang terpisah dari lingkungannya yang menjadi tempat untuk mengoperasikan objek kehendak. Taktik adalah permainan jebakan, tipu daya, pemalsuan kehidupan sehari-hari, berusaha menciptakan ruang yang dapat ditinggalkan. Menghadapi berbagai kemungkinan konflik baru, bagi Giddens, agensi memiliki kapasitas transformatif, yang memungkinkan pelaku memonitor tindakan sehari-hari secara reflektif, tidak saja pelaku memonitor aktivitasnya, tetapi juga memonitor secara rutin aspek fisik, sosial dan konteks aktivitas tersebut. Berdasarkan hasil monitoring reflektif, pelaku belajar dari pengalamannya untuk melakukan tindakan yang lebih baik di waktu mendatang.

Dari tindakan reflektif “diri”, pelaku berinteraksi dengan “diri” yang lain dan membentuk kelompok kerjasama. Kerjasama yang diciptakan para pelaku atas dasar saling percaya (*trust*) dan saling bergantung. Setiap kelompok yang dibentuk dari interaksi para pelaku sehari-hari, tidak membentuk diri dalam institusi atau organisasi.

Tetapi setiap kelompok memiliki ciri-ciri struktur, ada kesepakatan bersama sebagai pedoman yang relevan bagi tindakan yang dilakukan bersama. Juga didukung sarana yang tersedia pada si pelaku yakni, skema interpretasi, fasilitasi dan norma-norma yang ada. Kelompok-kelompok kerjasama ini, antara lain kelompok: pengemudi motor ojek, pekerja bangunan, perempuan usaha kecil, petani-nelayan, pemuda dan anak-anak. Kelompok kerjasama ini ada dalam suatu kolektifitas masyarakat, sehingga gerakan kelompok kerjasama ini sebagai gerakan kolektifitas dalam rangka mengkonstruksikan serta memelihara integrasi bangsa.

SIMPULAN

Disadari bahwa pengaruh globalisasi dapat mendorong kekuatan manusia untuk mempolitisasikan agama juga sehingga melemahkan konsep “integrasi bangsa”. Persoalannya bagaimana memelihara integrasi bangsa melalui penguatan identitas multikultural. Pendekatan identitas multikulturalisme dapat di gunakan untuk memelihara integrasi bangsa. Mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, Integrasi bangsa bersifat kultural dengan pendekatan teori stukturasi Giddens yang mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik,

³⁴Michel De Certeau. *The Practice of Everyday Life*. (Berkeley-Los Angels-London: Universirty of California Press, 1984), 36-37.

kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Bagaimana masyarakat menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional.

Melalui tindakan manusia masyarakat menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia. Komitmen masyarakat multikultur di Maluku memperkuat identitas multikultural mengandung semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Memelihara integrasi bangsa produksi tindakan pelaku yakni agen–struktur, individu-masyarakat, terletak pada kekuatan ke empat perangkat budaya : sosial-budaya, agama, ekonomi dan politik. Keempat perangkat budaya ini ada dalam satu sistem. Berangkat dari kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertindak laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal akan integrasi kebudayaan produksi tindakan. Melalui tindakan, manusia menciptakan kebudayaannya memelihara integrasi bangsa.

Lebih jauh multikulturalisme memiliki pengertian dan kepentingan yang lebih luas karena konsep ini ingin memaknai dirinya tidak hanya pada tingkat lokal tetapi juga regional, nasional, dan global. Secara praktis konsep identitas multikultural dapat digunakan untuk mendukung tujuan integrasi bangsa, pada batas-batas tertentu. Hal inilah yang nampaknya yang mendorong pihak-pihak yang berwenang di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi multikulturalisme yang dapat dikembangkan pada masa mendatang dalam rangka memelihara integrasi bangsa.

Melalui tulisan ini, penulis ingin mengajak pembaca untuk bersama-sama memikirkan jalan terbaik yang harus ditempuh agar integrasi bangsa tetap lestari. Dalam perspektif antropologi seharusnya diperkuat gagasan multikultural melalui sistem pendidikan multikultural, sebagai model dalam memperkuat landasan integrasi nasional agar integrasi bangsa tetap terpelihara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthoni, Richard. *The Color Problem*. Baltimore: Penguin Books, 1995
- Arendt, Hannah. “*What Is Freedom?*” dalam Peter Baehr (ed.), *The Portable Hannah Arendt*. Baltimore: Penguin Books, 2000
- Bailey, F. G. *Stratagems and Spoils*. Oxford : Blackwell, 1969
- Barker Chris. *Cultural Studies: Teori Dan Praktik*. Yogyakarta, Kreasi Wacana, 2004
- Indrato, Ferry T. (ed.). *Pendidikan Multikultural yang Berkeadilan Sosial*. Yogyakarta: Dinamika Edukasi Dasar bekerjasama dengan Misereor/KZE, 2006

- Golberg, David. *The Multiculturalism: a Critical Reader*. Cambridge: Blackwell Publisher Inc, 1995
- Erikson, Erik H. *Identitas dan Siklus Hidup Manusia*. Terj Agus Cremers, Jakarta: Gramedia, 1989
- Giddens, Anthony. *New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociologies*. London: Hutchinson of London, 1976.
- . *Modernity and Self identity*. San Francisco: Stanford University Press, 1991.
- . *Beyond Left and Right: The future of Radical Politics*. San Francisco: Stanford University Press, 1994.
- . *Runway World: How Globalization is Reshaping Our Lives*. London: Routledge, 1999
- Geertz, Clifford, *Ritual an Social Change : A Javanese Example*, dalam *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Books, 1973
- Hall, Stuart. "Old and New Identities, Old and New Ethnicities", dalam Anthony D. King (ed.) *Culture Globalization and the World-System: Contemporary Conditions for the Representation of Identity*. Hampshire and London: The Macmillan Press, 1991
- Li, Tania. *Articulating Indigenous Identity in Indonesia : Resource Politics and the Tribal Slot*. Berkeley *Workshop on Enviromental Politics*. Berkeley: University of California, 2000
- Malcolm, Waters. *Modern Sociological Theory*. London: Sage Publications, t.t.
- Maulana, Karengga, *Black and Latino Relation: Contents, Challenge, and Possibilities. Essay on Cultural Peace*. Baltimore: Penguin Books, 1997
- Parekh, B. *Rethinking Multiculturalisme: Cultural Diversity and Political Theory*. Cambridge: Harvard University Press, 2000
- Parekh, B. 1997. "National Culture and Multiculturalism" dalam Kenneth Thompson (ed.). *Media and Cultural Regulation*. London: Sage Publications in association with the Open Universit, 1997
- Pip, Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial, Dari Teori Fungsionalisme hingga Post-Modernisme*. terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta, Yayasan Obor Indo, 2009
- Rubin, Derk and Verhuil, Jaap. *American Multiculturalism After 9/11*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2009
- Ritzer, George. *Modern Sociological Theory*, New York: The McGraw-Hill Companies INC, 1996
- Ritzer, G. dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Prenada Media, 2004
- Ronald, Robertson, *Agama Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993
- Saifuddin, A.F. dan Zulyani Hidayah. *Politik Dan Etnisitas: (Re) Konstruksi Kemelayuan di Riau. Kebijakan Kebudayaan di Masa Orde Baru*. Jakarta: LIPI Berkerja sama dengan Ford Foundaton, 2000
- Sutrisno, Muji, dkk. *Cultural Studies: Tantangan bagi Teori-teori Besar Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Koekoesan., 2007
- Suparlan, Parsudi. *Hubungan Antar Suku Bangsa*. Jakarta: Yayasan Kajian Ilmu Kepolisian, 2003

St. Nugroho dalam Andre Ata Ujian, dkk. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama*. Jakarta: t. p. 2006

Taylor, Charles. *Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition*. Princenton: Princenton University Press, 1994

Turner, T. “Anthropology and Multiculturalisme: What Anthropology that Multiculturalism Should be Mindful of?” dalam *Cultural Anthropology*, 8:411-29, 1993